



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAIFULLAH WALIULU
2. Jabatan : LURAH
3. NHK : 444675

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **253.000.000**

1. MOTOR, HONDA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
28.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **28.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **73.613.018**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.854.613.018**

III. HUTANG **Rp.** **100.008.390**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.754.604.628**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADMIRAL
2. Jabatan : SEKRETARIS KELURAHAN
3. NHK : 226891

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.375.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 9750 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. Bangunan Seluas 26 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **348.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **184.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	970.915.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.878.415.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.878.415.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Desember 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : EKO YULIONO
- Jabatan** : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
- NHK** : 223775

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.541.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 908.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 417.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 573.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 643.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **197.000.000**

- MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOTOR, YAMAHA BN1 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
- MOBIL, NISSAN X-TRAIL Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- MOTOR, YAMAHA YAMAHA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
9.500.000
7. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.738.200.000

III. HUTANG Rp. 485.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.253.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : EVI NURLELA
- Jabatan** : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
- NHK** : 214566

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.105.615.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.075.865.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
- Tanah Seluas 616 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 67.500.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 247.250.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- Tanah Seluas 935 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **647.350.000**

- MOTOR, HONDA VARIO D1A02N19M1AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.700.000
- MOTOR, HONDA PCX V1J02Q32L0AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.400.000



3. MOTOR, HONDA N1N02Q43L1 AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 22.900.000
4. MOTOR, HONDA A1F02N36M1 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 15.200.000
5. MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 NEW S CVT GR SPORT 3 AB Tahun
2022, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
6. MOBIL, MITSUBISHI NEW XPANDER CROSS 1.5L PLUS 4X2
CVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 351.150.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	322.977.218
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.101.142.218
III. HUTANG	Rp.	251.370.600
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.849.771.618

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI WULANDARI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 757566

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	175.800.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
4. MOTOR, YAMAHA B6H-AI AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.800.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.175.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.583.275
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.204.558.275
III. HUTANG	Rp.	134.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.070.558.275

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FENTY SUBIANTINI KUSUMAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 192633

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 178.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 288.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 31.902.040

Sub Total Rp. 1.968.802.040

III. HUTANG Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

1.968.802.040

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.